

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN)  
DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEN  
KABUPATEN SEMARANG**

**Tesis S-2  
Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Oleh :  
Oemi Saptaningtyas Oetami, S.H.  
B4B000174**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
SEPTEMBER 2002**

# **TESIS**

## **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh :

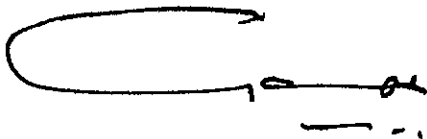
Oemi Saptaningtyas Oetami, S.H.

B4B000174

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 24 September 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

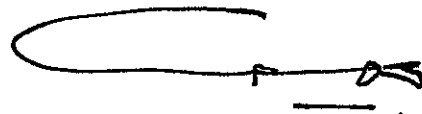
Menyetujui :

Pembimbing,



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya tulisan ini, dengan judul “ PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat kelulusan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa setelah lulus nantinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kesalahan yang penulis lakukan sehingga jauh dari sebuah karya yang dikatakan sempurna .

Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kami kepada :

1. Allah SWT, yang atas ridlo-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan thesis ini
2. Prof.IGN.Sugangga,S.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Prof.IGN.Sugangga,S.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik

4. Bapak Suharto,S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Kepala Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, yang telah memberikan sumbang saran kepada penulis
6. Bapak Sekretaris Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, yang telah membantu dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan
7. Suami dan anakku tercinta yang penuh cinta dan selalu memberi motivasi kepada penulis
8. Bapak (Alm), Ibu, Kakung dan seluruh Saudara penulis yang selalu memberikan dukungan
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan UNDIP, khususnya Rini Wahid, Nita, Mbak Yayuk
10. Segenap karyawan TU (Pengajaran) di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi besar sekali bantuannya dalam penulisan tesis ini

Tiada gading yang tak retak, demikian halnya dengan isi dan penyusunan tesis ini. Adapun saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembacanya.

Motto:

***“Siapa tidak bisa memimpin diri sendiri, tidak akan  
bisa memimpin orang lain..... “***

(Plato)

Karya ini kupersembahkan untuk;  
Suamiku tercinta ***Andhi Supriyadi***,  
Anak-anakku tersayang ***Dante Alif***  
***Supriyadi (Ale) & “adiknya”***

## ABSTRACT

Indonesia is popular as agricultural country, where agriculture is one of the livelihoods. The majority of Indonesian people are farmer and living on the village, they still keep their local tradition as believe. In this case related problem with land transaction, traditional law are exist on the village community which cover by UUPA in the chapter 5 mention that Agricultural Law for earth, water and outer space is Traditional Law as long as not against the national and country interest, including agricultural share agreement. The content of agricultural share agreement is covered by Technical Traditional Land Law, as of working agreement related with land where crop as an object instead of land.

Interesting point on that working agreement, is implementation at most of Kabupaten Semarang area especially at Desa Pakopen Kecamatan Bawen are done as non contractual agreement or on the other words as a verbal agreement between landowner and tenant. Even though, Government has arranged this kind of agreement, by releasing a regulation of product sharing (Farmland) number 2 (two) 1960, but landowner and tenant are not following this regulation accordingly. This is cause by leak of

socialization of law enforcement and habitual that exists in the community.

Using naturalistic paradigm research method with social legal approach.

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana pertanian sangat menonjol sebagai salah satu mata pencaharian penduduknya. Sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani hidup di pedesaan dan masih memegang teguh adat istiadat setempat. Dengan demikian, masalah-masalah yang berhubungan dengan transaksi tanah pertanian, peraturan-peraturan adat masih berlaku di masyarakat, yang dilindungi oleh UUPA yaitu Pasal 5 yang menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Materi bagi hasil tanah pertanian masuk dalam lingkup hukum tanah adat tehnik, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Yang menarik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut di sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang khususnya di Desa Pakopen Kecamatan Bawen dilakukan secara nonkontraktuil atau dengan kata lain dilakukan secara lisan antara pihak pemilik tanah pertanian dan pihak penggarap. Padahal mengenai perjanjian kerjasama tersebut telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Bagi Hasil (Tanah Pertanian) nomor 2 tahun 1960, tetapi para pemilik dan penggarap tanah pertanian tersebut tetap saja tidak melakukan perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tersebut. Hal tersebut dikarenakan : kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum dan adat kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat.



Metodologi penelitian yang digunakan adalah paradigma naturalistik dengan pendekatan yuridis sosiologis.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
MOTTO .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Pembatasan Masalah .....	5
3. Perumusan Masalah .....	5
4. Tujuan Penelitian .....	6
5. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Terhadap Perjanjian/Perikatan Dalam Hukum Adat .....	8
2. Faktor-faktor yang Mendukung Adanya Kepercayaan Diantara Para Pihak .....	14
3. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Secara Adat .....	17
4. Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) .....	20

5. Pengertian Perjanjian Secara Umum .....	26
--	----

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian dan Pendekatannya .....	38
2. Metode Pendekatan .....	39
3. Spesifikasi Penelitian .....	39
4. Populasi dan Sampling.....	40
5. Metode Pengumpulan Data .....	42
6. Analisa Data .....	44

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	45
2. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Pakopen Kecamatan Bawe Kabupaten Semarang .....	51
3. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil (Tanah Pertanian) .....	63
6. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah Pertanian dan Upaya Penyelesaiannya .....	77

### BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan .....	86
2. Saran .....	88

### RINGKASAN

### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Persekutuan adat menurut Ter Haar Bzn merupakan gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata<sup>1)</sup> .

Di dalam masalah pertanahan di Indonesia, tidak bisa lepas dengan aturan-aturan adat yang berlaku mengenai tanah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang no.5 tahun 1960) yang menyatakan :

” bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas Hukum Adat atas tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.”

Selain itu, di dalam salah satu pasal UUPA yaitu Pasal 5 menyatakan bahwa :

“ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.....”

---

<sup>1</sup> Mr.B.Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana pertanian sangat menonjol sebagai salah satu mata pencaharian penduduknya. Sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani hidup di pedesaan dan masih memegang teguh adat istiadat setempat. Dengan demikian, masalah-masalah yang berhubungan dengan transaksi tanah pertanian, peraturan-peraturan adat masih berlaku di masyarakat.

Di Jawa Tengah, transaksi yang berhubungan dengan tanah pertanian dikenal dengan berbagai istilah. Untuk transaksi bagi hasil dikenal istilah maro dan mertelu. Untuk transaksi sewa tanah pertanian dikenal istilah sewa dan jual tahunan dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya.

Menurut Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (customary law).<sup>2)</sup>

---

<sup>2</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta 1952 halaman 30)

Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam lingkup hukum tanah adat tehnik, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman<sup>3)</sup>

Menurut Iman Sudiyat, adapun hakekat dari transaksi yang bersangkutan dengan tanah secara adat tersebut terdapat 3 (tiga) faktor utama yang perlu dicermati, yaitu:

1. Dasarnya : Pada saya ada tanah, tetapi tidak ada kesempatan /semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil; namun saya ingin memungut hasilnya; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya;
2. fungsinya : memproduksi milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduksi tenaga kerja tanpa milik tanah sendiri;
3. obyeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah) <sup>4 )</sup>

Yang menarik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut di sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang khususnya di Desa Pakopen Kecamatan Bawen dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

<sup>4</sup> Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta 1981

nonkontraktuil atau dengan kata lain dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan adanya rasa saling percaya antara pihak pemilik tanah pertanian dan pihak penggarap. Padahal mengenai perjanjian kerjasama tersebut telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Bagi Hasil (Tanah Pertanian) nomor 2 tahun 1960 terutama yang dinyatakan dalam pasal 3 (1) bahwa :

“ semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri dihadapan Kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut : Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Para pemilik dan penggarap tanah pertanian tersebut tetap saja tidak melakukan perjanjian tersebut secara tertulis meskipun sebagian dari mereka telah mengetahui manfaat dan arti pentingnya menuangkan perjanjian tersebut ke dalam perjanjian tertulis.

Berdasarkan pemikiran inilah maka usulan penelitian tesis dengan judul “ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ini membicarakan tentang “law in action” dan “living law”. Dalam hal ini di ketemukan adanya keterikatan non-hukum diantara para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini.

## 2. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa pakopen Kecamatan bawen Kabupaten Semarang, diadakan pembatasan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian baik pada tanah pertanian basah (sawah) maupun tanah pertanian kering (tegalan), tidak termasuk tanah perkebunan.

## 3. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang bagi hasil pertanian di atas , maka dapatlah dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) yang berlaku di Desa Pakopen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ?
2. Aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi pihak pemilik tanah dan pihak penggarap tanah dalam sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian sehingga mereka tidak melaksanakan Undang-Undang tentang Bagi Hasil (tanah pertanian) nomor 2 tahun 1960 ?



3. Apabila terjadi sengketa, apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh para pihak?

#### 4. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi pihak pemilik dan pihak penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian sehingga mereka tidak mempergunakan perjanjian tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh para pihak penggarap dan pemilik tanah.

#### 5. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Bagi kalangan praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengupayakan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960.
3. Adapun Bagi kalangan Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari hukum adat dan sebagai bahan bacaan dalam kajian ilmu sosial yang merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat khususnya para pemilik dan penggarap tanah pertanian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN / PERIKATAN DALAM HUKUM ADAT.

Menurut Hilman Hadikusuma, perikatan menurut Hukum Adat adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan. Jadi adanya perikatan karena kesepakatan. Dalam Hukum Adat, perikatan dapat terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya “perhutangan” perorangan atau sekelompok orang. Ter Haar menggunakan istilah “crediethandelingen” (perbuatan kredit, perbuatan perhutangan atau kepercayaan), “individuele crediet handelingen” atau perhutangan perorangan. Menurut Hukum Adat selain dari perhutangan perorangan terdapat pula perhutangan kebersamaan (communale crediet handelingen). Antara keduanya dapat saling mengisi dan saling mempengaruhi, oleh karena perikatan menurut Hukum Adat tidak saja bersifat sosial

ekonomi tetapi juga bersifat sosial budaya. Begitu pula diantara kedua sifat itu terdapat tanda-tanda ikatan<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Indonesia" membedakan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan (lainnya). Pembedaan antara hukum perjanjian dengan hukum perikatan lainnya itu timbul, oleh karena di dalam hukum perikatan lainnya itu dibicarakan mengenai perikatan yang timbul tidak dari perjanjian; artinya adanya keterikatan bukan karena dijanjikan akan tetapi keterikatan yang timbul karena sikap –tanduk (lain) tertentu.

A. Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

---

<sup>5</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma ,SH, *Hukum Perokonomian Adat Indonesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)

## 2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan, dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

## 3. Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya.

## 4. Perjanjian perburuhan.

Perjanjian ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya.

## 5. Perjanjian pemegangan

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan, dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang

dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

#### 6. Perjanjian pemeliharaan

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain-terpelihara , lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

#### 7. Perjanjian pertanggungan kerabat

TerHaar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. (B.Ter Haar Bzn 1950:125)

#### 8. Perjanjian serikat.

Yaitu kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi.

#### 9. Transacties waarbij grond betrokken is.

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut ( B. Ter Haar Bzn 1950:106). Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

### B. Hukum perikatan lainnya.

#### 1. Perikatan panjer.

Perikatan panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Panjer itu muncul apabila dalam suatu sikap-tindak tertentu (misalnya jual-beli) telah terjadi afspraak, dimana salah satu pihak (dalam jual-beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.

## 2. Perikatan Tolong menolong

Yaitu perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik diantara sanak saudara, tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-oleh akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu. Dengan demikian, adanya tolong menolong diantara dua pihak menimbulkan keterikatan diantara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan, tidak bersumber pada perjanjian.



2. Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan menyerahkan suatu benda tertentu  
Yaitu perikatan yang timbul dengan adanya sedikit pemberian dan disertai dengan permohonan kepada seseorang – pemberian mana pada dasarnya meletakkan suatu perikatan antara para pihak maka terjadi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan benda itu. Jawaban dari permohonan itu dapat saja diberikan pada saat itu, atau pada masa yang akan datang yang mungkin disertai dengan pelaksanaannya ataupun tidak melaksanakannya yang merupakan jawaban penolakan<sup>6</sup>

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG ADANYA KEPERCAYAAN DIANTARA PARA PIHAK .

Peranan etika jawa dalam menanamkan sikap saling percaya. Etika Jawa sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan agama Islam. Banyak etika Jawa yang dapat diterima oleh ajaran Islam, dan mempengaruhi sikap orang Jawa dalam bertindak dan bertingkah laku.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajai Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Diantara sifat-sifat atau karakter orang Jawa yang berkaitan dengan sikap menanamkan kepercayaan kepada orang lain adalah sebagai berikut :

1. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa

Menurut Soetrisno, ada tiga unsur jiwa manusia Jawa yaitu cipto, karso, roso. Ketiganya mempunyai pengaruh penting dalam manusia melakukan perbuatannya. Apabila orang barat lebih menitikberatkan pada pikiran atau rasio sebagai ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa, maka orang Jawa perasaan itu dapat dilatih, dikembangkan, agar selalu menguasai perbuatannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menguasai perasaannya, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ungkapan-ungkapan seperti “wong Jowo nggone roso, kuwato nahan howo,” adalah menggambarkan pentingnya peranan perasaan. Dengan menghormati perasaan orang lain, maka orang Jawa tidak suka bicara blak-blakan (terbuka) yang dikhawatirkan menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang Jawa sulit sekali mengatakan “tidak” karena hal ini dianggap akan melukai perasaan orang lain. Seringkali mereka mengatakan “ya” sekalipun yang mereka maksudkan adalah “tidak”. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksudkan baik “ya” atau “tidak” adalah juga melalui perasaan.

Prinsip-prinsip etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian menekankan konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan mempertahankan keseimbangan yang bersifat status quo. Konsep Jawa tentang "cocok" menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi tindakan manusia atas "pantes", dan "ora pantes". Sedangkan konsep mengenai "rasa" menekankan aspek dalam kehidupan.<sup>7</sup>

## 2. Sifat tepo sliro

Tepo seliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan perlakuan antara seseorang terhadap orang lain.

## 3. Sifat senang berlaku rukun.

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis." Rukun" berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang, dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara

---

<sup>7</sup> Soetrisno, PH., *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin Dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta, 1997: Pandawa

bertindak dengan menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan menomorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama.<sup>8</sup>

#### 4. Sikap menghormati orang lain

Dalam bagian lain, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa selain prinsip kerukunan, maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah "Prinsip Hormat". Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan dearajat dan kedudukannya. Untuk menanamkan sikap hormat terhadap orang lain, maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan tentang "wedi" (takut), "isin" (malu), dan "ewuh pakewuh" (sungkan) yang merupakan pengekan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.<sup>9</sup>

### 3. PENGERTIAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN SECARA ADAT

Menurut Ter Haar, perjanjian berperangai tepat yang bersangkutan dengan tanah, tapi yang tidak dapat dikatakan

---

<sup>8</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta, 1996 : Gramedia Pustaka Utama.

<sup>9</sup> ibid.

berobyek tanah dalam arti kata hukum adat tehnis, ialah perjanjian paruh hasil tanaman (*delbouw transactie*), yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-lingkungan hukum. Dasar perjanjian paruh hasil tanaman ialah : saya ada sebidang tanah tapi tidak ada kesempatan atau kemauan, mengusahakan sendiri sampai berhasilnya; tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya mengerjakannya, menanaminya dan memberikan kepada saya sebagian hasil panennya. Sedangkan fungsi perjanjian paruh hasil tanaman ialah membuat berhasilnya milik tanah tanpa pengusaha tanah sendiri dan mempergunakan tenaga pekerjaan dari orang lain yang tanpa milik tanah sendiri.<sup>10</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, perjanjian bagi hasil adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik atau pengusaha tanah (ladang, kebun, sawah, kolam atau tempat perikatan), menyerahkan tanahnya, kepada pihak yang lain sebagai penggarap atau pekerja dengan ketentuan bahwa dari hasil tanah tersebut akan dibagi 2 (dua) atau dibagi 3 (tiga) diantara dua pihak. Pada umumnya perjanjian bagi hasil terjadi diantara pemilik dan penggarap dilatarbelakangi :

---

<sup>10</sup> Bzn Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan oleh K.Ng.Soebekti Poeponoto, Pradnya Paramita; Jakarta

### 1. Pihak pemilik tanah

- Memiliki tanah, tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya tanah sendiri,
- Menolong dan memberi kesempatan kepada penggarap yang tidak memiliki tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tertentu,
- Keinginan memperoleh hasil tanpa bersusah payah (kuli kenceng, sikep, pribumi).

### 2. Pihak penggarap

- Tidak memiliki tanah garapan hanya buruh tani (kuli gundul, numpang)
- Kelebihan waktu bekerja karena tanah garapan milik sendiri tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarga
- Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Di lingkungan masyarakat adat Jawa dalam perjanjian bagi hasil atau hubungan kerja pertanian di atas tanah orang lain berlaku adat pemberian sesuatu dari penggarap kepada pemilik tanah, yang disebut ;

- a. Srama, yaitu pemberian atau pembayaran ala kadarnya dari penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda

permohonan, untuk memulai pekerjaan sebagai penggarap.

- b. Mesi, yaitu pemberian atau pembayaran dari penggarap tanah kepada pemilik tanah sebagai tanda pengakuan berada dan mengusahakan tanah milik orang lain.<sup>11</sup>

#### 4. TINJAUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN)

- a. Latar belakang disusun Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 pada bagian ayat (3) Penjelasan Umum menyatakan bahwa :

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-Undang ini , yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud :

- agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan
- dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar
- dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akanbertambahlah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah

---

<sup>11</sup> Hadikusuma, Hilman,SH,Prof,Dr,*Hukum Perekonomian Adat Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2001

yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.”

Selain itu pada penjelasan umum ayat (5) menjelaskan bahwa;

‘Akhirnya perlu ditegaskan , bahwa di dalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu daripada yang lain, tetapi akan memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil –tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa sehingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali.”

#### b. Isi Undang-Undang nomor 2 tahun 1960

Pengertian bagi hasil menurut Pasal 1 huruf c undang-undang ini adalah:

“perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut: penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik , dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“pihak yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaan sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.”



Bentuk perjanjian bagi hasil juga diatur dalam undang-undang ini, yaitu pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari camat / Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut ; Camat.
- (3) Pada tiap kerapatan desa kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Jangka waktu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- (1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- (2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria , oleh camat dapat diijinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku

terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain beserta semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Begitu juga apabila penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal tersebut diatur pada pasal 5 Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang-Undang ini mengatur mengenai pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum jangka waktu perjanjian, yang hanya dimungkinkan dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini ;

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa
2. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Kewajiban pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut ;

- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud.
- (3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pada pasal 9 mengatur bahwa kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Kewajiban penggarap menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut dalam pasal 6, diatur dalam pasal 10.

c. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960

Menurut Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
- 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering

Pasal 4 ayat (2)

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih , yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan bersama menteri Dalam negeri dan menteri Pertanian Nomor 211 tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 adalah sebagai berikut ;

- Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang nomor 2 tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maximum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus berikut :

$$Z = 1/4X$$

Z= biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak,

tenaga tanam dan panen  
X= hasil kotor

- F. Jika hasil kotor melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan, maka  
Hak Penggarap = Hak Pemilik  
$$\frac{X-Z}{2} = \frac{X-1/4X}{2}$$

## 5. PENGERTIAN PERJANJIAN SECARA UMUM

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian sewa menyewa misalnya, maka yang menyewakan terikat untuk menyerahkan barang yang disewakan dan penyewa berkewajiban membayar uang sewa sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perkataan perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut oleh para ahli diartikan sebagai perbuatan hukum, karena hubungan yang tercipta dari perjanjian itu adalah hubungan hukum (*rechtbetckikking*), sedangkan perkataan mengikatkan dirinya yang memberi kesan bahwa perjanjian itu hanya sepihak diterjemahkan juga dengan saling mengikatkan dirinya, karena disamping ada perjanjian sepihak ada juga perjanjian yang bersifat timbal balik.

Perjanjian sering disamakan dengan perikatan. Tetapi yang benar perikatan merupakan isi dari perjanjian, yang mana dalam suatu perjanjian terdapat beberapa perikatan. Penggunaan kata

perikatan sebagai terjemahan dari kata *Verbinten* belum merata<sup>12</sup>. Sebagian sarjana masih ada yang menterjemahkan menjadi persetujuan.<sup>13</sup>

Menurut R Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup>

Wiryono Projodikoro memberikan pendapat mengenai pengertian perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>15</sup>

Definisi perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan kembali definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>16</sup>

Berbeda dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana

---

<sup>12</sup> Diambil dari buku *Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, tahun 1980

<sup>13</sup> Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 1992, hal 1

<sup>14</sup> Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 49

<sup>15</sup> Projodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, hal. 9

<sup>16</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1990, hal. 78.

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Ada para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang, yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak dalam perjanjian

Persetujuan tersebut bersifat tetap, yang dihasilkan dari suatu suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Selain pengertian-pengertian perjanjian di atas, dalam perjanjian dikenal beberapa asas yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Makna dari asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian berupa apa saja, baik bentuk, isi dan pada siapa perjanjian itu ditujukan

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat sesuatu atau tidak perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas untuk menentukan isi perjanjian maupun syarat-syaratnya, dan bebas untuk menentukan bentuknya, tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.



Jadi dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja ( mengenai apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, karena dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

#### b. Asas konsensualisme

Untuk terjadinya suatu perjanjian adalah cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M,A,Qhom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.20.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

c. Asas itikad baik.

Orang yang akan membuat perjanjian harus mempunyai itikad yang baik. Itikad baik secara subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu akan diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>18</sup>

d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini merupakan suatu asas perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat sebagai undang-undang. Jadi, dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M,A,Qhom, Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Pejanjian Beserta Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.20.

<sup>19</sup> *ibid*, hal 19

Jadi asas ini dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga <sup>20</sup>

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Selain asas, perjanjian juga terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian jenis ini merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Yang menjadi kriteria adalah kewajiban kedua belah pihak atau salah satu

---

<sup>20</sup>. M,A,Qhom Syamsudin , *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian* , Liberty, Yogyakarta, 1985,hal.20

pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik tak berwujud berupa hak. <sup>21</sup>

b. Perjanjian percuma dan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja.

Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.<sup>22</sup>

c. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas misalnya jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 86

<sup>22</sup> Ibid hal 87

<sup>23</sup> Ibid ,hal.88

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara para pihak .

Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata .<sup>25</sup>

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak

---

<sup>24</sup> Ibid,hal 88

<sup>25</sup> *ibid*, hal.89

memenuhinya, maka hakim akan membatalkan perjanjian tersebut.

Syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

a. Persetujuan kehendak para pihak.

Maksudnya, bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat dirinya, dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Perjanjian dianggap tidak sah apabila perjanjian tersebut terjadi karena:

1. Paksaan / dwang
2. Kekhilafan / dwaling
3. Penipuan / bedrog

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Selain itu apabila yang diperjanjikan adalah mengenai harta kekayaan, maka orang tersebut harus orang yang berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

c. Suatu hal tertentu

Sebagai pokok perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit ditentukan jenisnya atau dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang bebas untuk membuat maupun tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat. Orang juga bebas memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian kerjasama, dan dengan maksud apa orang itu melakukannya asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam tulisan ini, terdapat bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan. Padahal dalam Pasal 3 undang-undang bagi hasil nomor 2 tahun 1960 telah menentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis. Tetapi hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh para pihak dan tetap memilih perjanjian secara lisan karena ada beberapa aspek yang mempengaruhinya.

Apabila ada perselisihan mengenai kerjasama ini, para pihak lebih cenderung menggunakan cara perdamaian., yang prosedurnya dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih itu sendiri, atau

dengan musyawarah mufakat menurut adat dengan ditengahi oleh petugas pemerintahan desa. Akan tetapi karena perjanjian kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam tulisan, maka para pihak akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya.



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. PARADIGMA PENELITIAN DAN PENDEKATANNYA**

Penelitian dilakukan guna mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam bab terdahulu.

Penelitian yang akan dilaksanakan memerlukan metode penelitian yang dapat berjalan lebih rinci, terarah, dan sistematis. Dengan demikian data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

Menurut Kartini Kartono mengenai arti pentingnya penelitian ilmiah bahwa :

“Sesuai dengan tujuan, penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik (Naturalistic Paradigm) yaitu penelitian dilakukan dalam situasi wajar (natural setting). Peneliti mengikuti pandangan-pandangan dari informan , mengamati

---

<sup>26</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung:Alumni, 1980. hal.15

lingkungannya, budayanya, yang mengakibatkan hasil dari penelitian ini mendeskripsikan obyek apa adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), yang lebih mengutamakan *law in action* dan *living law* daripada *law in books*. Studi *law in action* ini bersifat *non doctrinal* atau empiris.

## 2. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Disebut yuridis sosiologis karena selain menekankan pada aturan-aturan yang ada dalam ilmu hukum, juga menekankan pada praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan materi mengenai Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil (tanah pertanian)

## 3. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian ini untuk memberikan

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) di Desa pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Sedangkan analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makan pada pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang .

#### 4. POPULASI DAN SAMPLING

##### A. Populasi

Penentuan informan dilakukan secara non random purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Dalam tehnik ini penentuan sampelnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat atau karakteristik tertentu
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi

- c. Penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan

Informan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Pemilik tanah pertanian yang melakukan kerjasama penggarapan tanah pertanian secara adat di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- b. Petani penggarap yang bukan pemilik tanah pertanian yang digarapnya di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- c. Kepala Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
- d. Pamong Desa pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

## B. Tehnik Sampling

Peneliti akan memilih beberapa informan yang merupakan pelaku perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam memperoleh data.

Dengan berdasarkan pada tehnik tersebut di atas dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa informan yang berjumlah 30 orang.

Sesuai dengan judul tulisan ini, maka lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa pakopen Kecamatan bawen Kabupaten Semarang sebagai tempat kedudukan dari obyek penelitian.

## 5. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis mencari data langsung dari lapangan, yaitu para pelaku perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan Kepala Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan melalui observasi dan wawancara secara mendalam baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak, misalnya melalui daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para informan. Mengenai wawancara ini, menurut Soetrisno Hadi adalah sebagai berikut :

“Interview merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya

jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar”<sup>27</sup>

Sedangkan untuk data sekunder, penulis mencari data dengan menelaah buku-buku kepustakaan dan perundang-undangan , yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)
2. Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK 322/K/1960 tentang Pelaksanaan UU no.2 tahun 1960
3. Peraturan menteri pertanian dan Agraria no.4 tahun 1964 tentang penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
4. Peraturan Menteri Agraria no.4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil
5. Instruksi Presiden RI o.13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU no.2 tahun 1960
6. Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian no.211 tahun 1980 no.714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Perjanjian bagi Hasil.

---

<sup>27</sup> (Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta 1980, hal. 136-149)

## 6. ANALISA DATA

Analisa data dilakukan secara interpretatif , yaitu data yang telah dikumpulkan, dideskripsikan secara kualitatif. Kegiatan yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data yang berupa tabel-tabel dan penarikan kesimpulan , yang kesemuanya itu dilakukan secara bersama yang menjadi suatu rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Jadi model analisa data yang bersifat kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus.

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi, yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Letak dan luas wilayah**

Desa Pakopen yang merupakan salah satu jalur pariwisata Bandungan dan Gedong Songo termasuk dalam wilayah Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Pakopen
2. Dusun Kalikembar
3. Dusun Cobleng
4. Dusun Sukorejo

Adapun wilayah Desa Pakopen dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara dan sebelah Timur adalah Kecamatan Bergas;
2. Sebelah Selatan adalah Desa Jimbaran ;
3. Sebelah Barat adalah Desa Sidomukti ;

Desa pakopen memiliki luas wilayah 307 Ha, yang terdiri : lahan untuk pemukiman , bangunan-bangunan sosial dan perkantoran, lahan pertanian yang berupa sawah dan tegalan ,serta lahan untuk perikanan.



## B. Topografi dan keadaan tanah

Wilayah ini terletak pada ketinggian 539 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata per tahun 2372 mm, serta keadaan suhu rata-rata 23 derajat celcius. Hampir keseluruhan dari wilayah Desa Pakopen berupa perbukitan / pegunungan, dengan kondisi kesuburan tanah 90% merupakan tanah subur dan hanya 10% yang merupakan tanah kritis/tidak subur.

Pengairan di Desa Pakopen didukung oleh adanya beberapa aliran sumber mata air di daerah perbukitan. Sumber mata air ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dengan terlebih dahulu ditampung di bak penampungan untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk setempat.

## C. Perhubungan

Jaringan jalan yang menghubungkan desa Pkopen dengan kota Kecamatan dan kota Kabupaten berupa jalan aspal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sarana angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah :

- a. Colt penumpang
- b. Minibus (jurusan Bandungan-Semarang)

- c. Mobil bak terbuka termasuk didalamnya truck dan colt (sebagai angkutan barang)

#### D. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pakopen berdasarkan kepadatan penduduk adalah sebagai berikut :

- Laki-laki : 1754 jiwa
- Perempuan : 1790 jiwa
- Jumlah seluruhnya : 3544 jiwa
- Kepadatan Penduduk : 1181 per km

Jumlah penduduk berdasar struktur mata pencaharian penduduk :

- Petani & buruh tani : 1663 jiwa
- Peternak : 246 jiwa
- Buruh : 218 jiwa
- Pegawai Negeri Sipil : 5
- Wiraswasta : 52
- Pertukangan : 108<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian dari sebagian besar penduduk Desa Pakopen yang berjumlah 3544 jiwa ini adalah sebagai petani , yaitu kurang lebih 1663 jiwa. Sedangkan sisanya bermata

---

<sup>28</sup> \_\_\_\_\_, *Buku Profil Desa Pakopen kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*, tahun 2001/2002

pencarian sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, wiraswasta dan lain sebagainya.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Pakopen menurut data tahun 2001/2002 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya tamat Sekolah Dasar, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

- tamat Sekolah Dasar : 2492 jiwa.
- tamat SLTP : 47 jiwa
- tamat SLTA : 19 jiwa
- tamat perguruan Tinggi : 4 jiwa
- tidak tamat SD : 438 jiwa

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kualitas angkatan kerja di Desa pakopen adalah:

- Angkatan kerja tidak tamat SD : 438
- Angkatan kerja tamat SD : 1549
- Angkatan kerja tamat SLTP : 47
- Angkatan kerja tamat SLTA : 19
- Angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi: 4<sup>29</sup>

E. Agama, adat istiadat, kesenian, olah raga.

Penduduk Desa Pakopen mayoritas memeluk agama Islam dengan komposisi sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> \_\_\_\_\_, *Buku Profil Desa Pakopen kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*, tahun 2001/2002

- i. Pemeluk Agama Islam : 3370 orang,
- ii. Pemeluk Agama Kristen dan Katolik: 184 orang.

Sarana peribadatan terdiri dari;

- i. Bangunan Masjid : 6 buah,
- ii. Musholla : 12 buah.

Upacara adat yang masih dilaksanakan di Desa Pakopen adalah upacara Kelahiran, upacara Kematian, dan sedekah desa. Mengenai sedekah desa biasanya dilakukan disetiap dusun pada saat setelah musim panen.

Kegiatan gotong royong dan bersih desa masih tetap terjaga kelestariannya.

Kegiatan kepemudaan terdiri dari kegiatan Karang Taruna, kesenian rebana dan olah raga (sepak bola, bola volley).<sup>30</sup>

#### F. Pertanian dan Penggunaan Tanah.

Pemanfaatan lahan potensial dari Desa ini sudah sesuai dengan kondisi alam, yaitu sebagai lahan pertanian, baik yang berupa pertanian padi, palawija maupun sayur –sayuran.

Perincian pemanfaatan lahan di Desa Pakopen adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> \_\_\_\_\_, *Buku Profil Desa Pakopen kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*, tahun 2001/2002

1. Tanah sawah : 165 ha
2. Ladang/tegalan : 326 ha
3. Pemukiman umum : 80 ha

#### G. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Pakopen terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Badan Perwakilan Desa
- c. Sekretaris Desa
- d. Kepala Urusan Pemerintahan
- e. Kepala Urusan Pembangunan
- f. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
- g. Kepala Urusan Keuangan
- h. Kepala Urusan Umum
- i. 4 orang Kepala Dusun

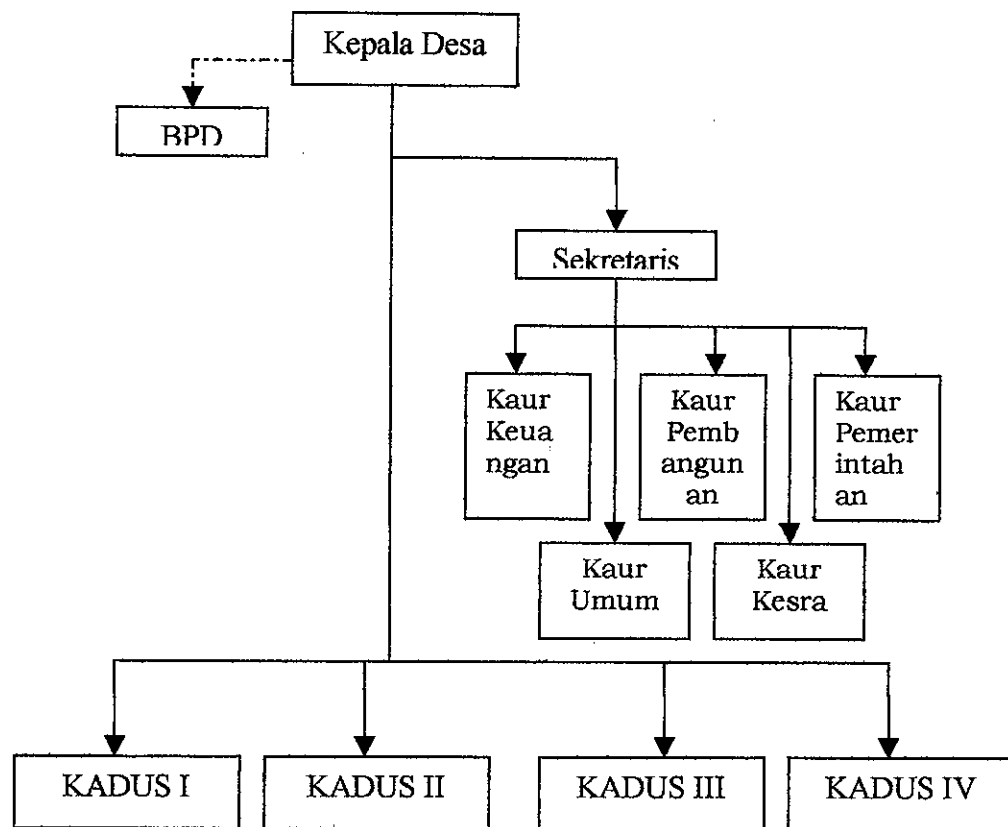
#### H. Sosial Kemasyarakatan

Jumlah warga tidak mampu : 23 kepala keluarga.

#### I. Struktur organisasi Pemerintah Desa<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> \_\_\_\_\_, *Buku Profil Desa Pakopen kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*, tahun 2001/2002



## 2. SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG

Sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Pakopen , menurut K. Suwandi , Kepala Desa Pakopen berdasarkan wawancara pribadi, sudah ada sejak dahulu, dan merupakan sebagai salah satu bentuk perekonomian adat

yang memberikan nilai tambah bagi penduduk setempat.

Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Dari pihak pemilik tanah ;

- ketidakmampuan pihak pemilik tanah untuk menggarap tanahnya sendiri karena tanah yang dimilikinya terdiri dari beberapa bidang berada di beberapa tempat yang saling berjauhan
- tidak adanya waktu untuk menggarap tanah yang dimilikinya , dikarenakan pekerjaan utamanya telah menghabiskan sebagian besar waktunya
- adanya keinginan dari pemilik tanah untuk mendapatkan hasil dari tanahnya tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk menggarapnya sendiri

Dari pihak penggarap :

- adanya keinginan untuk menambah penghasilan dari bidang pertanian, tetapi tidak memiliki tanah sendiri
- adanya kelebihan waktu kerja karena tanah yang dimilikinya sedikit.

- Keinginan untuk mendapatkan penghasilan tetapi tidak mempunyai tanah, dikarenakan pekerjaan utamanya sebagai buruh tani.<sup>32</sup>

Sedangkan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan pihak pemilik tanah yang melakukan bagi hasil tanah pertanian dan pihak penggarap tanah dapat diketahui berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1<sup>33</sup>

Pekerjaan

N=30

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Petani	25	83,33%
Wiraswasta	2	6,66%
Buruh	0	0 %
Pegawai Negeri	1	3,33%
Lain-lain	2	6,66%
Jumlah	30	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagian besar

---

<sup>32</sup> K.Suwandi, Wawancara Pribadi, *Kepala Desa Pakopen*, Semarang, Agustus 2002.

<sup>33</sup> Informan, Wawancara Pribadi, Semarang, Juni 2002



adalah petani yaitu 83,33%. Petani dalam hal ini termasuk didalamnya buruh tani. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar petani yang berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan dari bidang pertanian, sesuai dengan mata pencaharian utama mereka sebagai petani. Sedangkan yang lainnya adalah pegawai negeri 3,33%, wiraswasta 6,66%, lain-lain 6,66%.

Tabel 2<sup>34</sup>

Pendidikan

N=30

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Tidak tamat SD	5	16,66%
SD	16	53,33%
SLTP	6	20%
SLTA	3	10%
Perguruan Tinggi	0	0%
Jumlah	30	100%

Data diatas memperlihatkan bahwa pendidikan informan yang paling banyak adalah tamat SD yaitu 53,33%, kemudian tamat SLTP 20%, tidak tamat SD

---

<sup>34</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

16,66%, tamat SLTA 10%. Sedangkan yang tamat perguruan tinggi tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar informan masih rendah, yaitu paling banyak adalah tamat SD, dan tingkat pendidikan informan paling tinggi adalah SLTA.

Adapun jenis sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Pakopen adalah :

1. Untuk tanaman padi, sistem perimbangan bagi hasilnya adalah maro atau 1 : 1. Maksudnya satu bagian untuk pemilik tanah, dan satu bagian untuk penggarap.
2. Untuk tanaman palawija sistem perimbangan bagi hasilnya adalah mertelu atau 1 : 2. Maksudnya satu bagian untuk pemilik tanah, dan 2 bagian untuk penggarap.
3. Untuk tanaman sayur-sayuran, sistem perimbangan bagi hasilnya sama dengan tanaman palawija, yaitu mertelu atau 1 : 2.

Alasan maro untuk bagi hasil tanaman padi di tanah basah / tanah sawah adalah ;

- i. biaya perawatan ringan
- ii. perawatannya mudah
- iii. resiko kecil
- iv. bibit/ benih murah

Sedangkan alasan mertelu untuk bagi hasil palawija dan tanaman sayur-sayuran adalah :

- i. biayanya perawatan lebih mahal
- ii. perawatannya sukar
- iii.resiko besar
- iv. bibit / benih mahal

Tabel 3<sup>35</sup>

Sistem Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian

N=30

Sistem	Jumlah	Prosentase
Maro (1:1)	17	56,66%
Mertelu (1:2)	13	43,33%
Lain-lain	0	0%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 3 di atas, para pihak dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian terlihat hampir seimbang tetapi yang menggunakan sistem “maro” (1:1) terlihat lebih banyak yaitu 56,66% . Sedangkan yang menggunakan sistem mertelu (1:2) 43,33%. Hal ini terjadi

---

<sup>35</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

dikarenakan para pihak lebih cenderung memilih menanam padi daripada sayuran maupun palawija dengan alasan yang telah disebutkan di atas dalam bab ini. Hal ini terlihat pula dalam tabel jenis tanaman di bawah ini :

Tabel 4<sup>36</sup>

Jenis Tanaman

N=30

Jenis tanaman	Jumlah	Prosentase
Padi	17	56,66%
Palawija	6	20%
Sayuran	7	23,33%
Jumlah	30	100%

Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang wajar dan merupakan kebiasaan di Desa Pakopen apabila sistem bagi hasil tersebut diatas digunakan, karena seluruh biaya perawatan seperti pupuk, racun hama, tenaga ternak, biaya menanam, dan bibit tanaman ditanggung oleh penggarap secara keseluruhan.

Jenis tanah yang dijadikan lahan dari obyek perjanjian bagi hasil di Desa Pakopen keseluruhannya

---

<sup>36</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

adalah lahan sawah. Hal tersebut terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5<sup>37</sup>

Jenis Lahan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

N=30

Jenis lahan	Jumlah	Prosentase
Sawah	30	100%
Tegalan	0	0%
Jumlah	30	100%

Dari data dalam tabel-tabel tersebut di atas, dapat dianalisis berdasarkan kerangka berpikir dalam bab terdahulu bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar penduduk Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang bermata pencaharian sebagai petani. Baik itu sebagai petani pemilik tanah sekaligus penggarap, petani penggarap ataupun buruh tani. Ada juga sebagian kecil penduduk yang bertani hanya sebagai pekerjaan sampingan .

Bagi pemilik tanah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan berada di beberapa tempat yang saling

---

<sup>37</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

berjauhan sehingga tidak bisa mengerjakan sendiri tanah pertaniannya , mereka melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang yang bersedia menggarap atau disebut sebagai petani penggarap. Hal tersebut dilakukan karena pemilik tanah yang tidak sanggup merawat dan mengerjakan tanah miliknya tersebut berharap mendapatkan hasil dari tanah miliknya tanpa harus mengerjakannya sendiri. Selain itu dengan mempercayakan penggarapan tanahnya kepada pihak penggarap, maka tanah miliknya tidak akan terlantar atau istilahnya tidak akan menjadi tanah”bero”.

Untuk tanah yang letaknya jauh dengan tempat tinggal pemiliknya, sudah menjadi kebiasaan di Desa Pakopen kalau perjanjian bagi hasil dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap yang tempat tinggalnya dekat dengan tanah tersebut.

Hal lain yang menjadi penyebab dilakukannya perjanjian bagi hasil adalah pihak pemilik tanah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tanah pertanian miliknya dikarenakan pekerjaan utamanya cukup banyak menyita waktu yang dimilikinya, meskipun tanah tersebut berdekatan dengan tempat tinggalnya. Bagi pemilik tanah yang pekerjaan utamanya sebagai buruh pabrik, pegawai negeri ataupun swasta yang bekerja dari pagi

sampai sore hari atau sekitar 7 jam sehari sudah cukup melelahkan. Maka dari itu mereka mempercayakan penggarapan tanahnya kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Namun demikian ada juga pemilik tanah yang memang enggan mengerjakan tanahnya sendiri, tetapi mengharapkan hasil dari tanah yang dimilikinya tersebut, sehingga menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan sistem bagi hasil.

Bagi pihak lain yang berkeinginan untuk menambah penghasilan dari bidang pertanian meskipun mata pencaharian pokoknya bukan sebagai petani, tetapi tidak memiliki tanah sendiri maka mereka melakukan perjanjian bagi hasil sebagai pihak penggarap. Dengan mengerjakan tanah milik pihak lain dan menanaminya dengan tanaman yang sesuai dengan musim dan struktur tanah serta pengairannya, mereka berharap akan mendapatkan tambahan penghasilan, walaupun tidak semua hasil pertanian yang dipanen akan menjadi milik mereka sebagai penggarap sepenuhnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan namanya perjanjian bagi hasil, maka sebagian dari hasil pertanian menjadi bagian dari pemilik tanah sesuai dengan perimbangan sesuai dengan jenis tanaman yang dipanen.

Ada juga pihak yang dikarenakan tanah yang dimilikinya sedikit, sehingga waktu untuk mengerjakan tanah miliknya sendiri tersisa dan hasilnya pun kurang memuaskan karena adanya keterbatasan tanah yang dimilikinya tersebut. Untuk mengisi sisa waktu maka mereka mengajukan diri sebagai petani penggarap kepada pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil.

Pihak penggarap ada juga yang sebelumnya hanya merupakan buruh tani saja. Hal ini terjadi karena mata pencaharian utama mereka adalah petani, tetapi mereka tidak memiliki tanah sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apabila hanya mengandalkan dari pekerjaan mereka sebagai buruh tani dengan upah yang sangat sedikit, tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, mereka menerima tawaran sebagai penggarap, bahkan ada juga yang mengajukan diri sebagai penggarap kepada pemilik tanah dengan sistem perjanjian bagi hasil. Dengan demikian, akan menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak pemilik tanah tidak mengerjakan tanahnya tetapi mendapatkan hasil, sedangkan penggarap yang sebelumnya hanya sebagai buruh tani mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Dalam perjanjian bagi hasil di desa Pakopen, yang dibagi yaitu hasil panen setelah dikurangi 'derepan" atau upah potong tanaman.<sup>38</sup>

Berdasarkan kerangka berpikir dalam bab terdahulu, pelaksanaan sistem perimbangan bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakopen telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 jo Pasal 4 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1980 mengenai Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil nomor 2 tahun 1960, yaitu yang menyebutkan bahwa:

- A. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
- B. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan untuk hasil yang dibagi, tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Instruksi Presiden tersebut, yang menyebutkan bahwa hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus

---

<sup>38</sup> Soewito, Sekertaris Desa Pakopen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *wawancara pribadi*, Semarang 17 Juni 2002

dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat. Karena di Desa Pakopen yang dikatakan hasil bersih adalah hasil panen setelah dikurangi biaya “derep” atau biaya panen/pemotongan, tidak termasuk biaya benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam dan zakat.

### 3. ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN).

Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakopen masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Menurut Soewito, masyarakat tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah sejak lama diatur di dalam Undang-Undang. Bahkan para pelaksana pemerintahan Desa Pakopen juga banyak yang tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang tersebut, apalagi memahaminya. Penyebab ketidaktahuan tersebut diantaranya adalah tidak adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu dalam

setiap kegiatan penyuluhan hukum maupun penyuluhan pertanian oleh para petugas di Desa Pakopen, mengenai undang-undang perjanjian bagi hasil itu sendiri tidak pernah disinggung sama sekali.<sup>39</sup>

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa para pihak pelaku perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap tidak ada yang mengetahui bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah diatur di dalam undang-undang.

Tabel 6<sup>40</sup>

Pengetahuan tentang UU No. 2 tahun 1960

N=30

Pengetahuan tentang UU no.2 tahun 1960 tentang bagi Hasil (tanah pertanian)	Jumlah	Prosentase
Tahu	0	0%
Tidak tahu	30	100%
Jumlah	30	100%

---

<sup>39</sup> Soewito, Sekertaris Desa Pakopen ,Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, *wawancara pribadi*, Semarang, 17 Juni 2002

<sup>40</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

Dari tabel di atas, terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil adalah 0%, sedangkan yang tidak mengetahui adalah 100%. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tersebut di masyarakat.

Kenyataan bahwa perjanjian tertulis yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang semestinya dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, ternyata ditinggalkan.

Tabel 7<sup>41</sup>  
Memakai Perjanjian Tertulis  
N=30

Memakai Perjanjian Tertulis	Jumlah	Prosentase
Ya	0	0%
Tidak	30	100%
Jumlah	30	100%

Melihat tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa 100% dari informan tidak menggunakan perjanjian tertulis dalam

---

<sup>41</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal tersebut berkaitan dengan tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8<sup>42</sup>  
Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian tertulis  
N=30

Alasan	Jumlah	Prosentase
Biaya mahal	5	16.66%
Prosedur rumit	8	26.6%
Percaya saja	15	50%
Lain-lain	2	6.66%
Jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak dibuatnya perjanjian tertulis paling banyak adalah adanya rasa percaya atau kepercayaan diantara pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap, yaitu 50%, sedangkan yang menyatakan prosedur rumit adalah 26,6%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tingkat pendidikan informan yang sebagian besar adalah tamat SD.

---

<sup>42</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

Sedangkan biaya pembuatan perjanjian tertulis yang menyatakan mahal adalah 16,66%, dan lain-lain 6,66%.

Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan oleh para pihak, dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 9<sup>43</sup>

Dasar Perjanjian Bagi Hasil

N=30

Dasar perjanjian	Jumlah	Prosentase
Kepercayaan	15	50%
Tolong menolong	10	33,33%
Kekeluargaan	5	16,66%
Kerukunan	0	0%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa dasar paling besar dalam membuat perjanjian bagi hasil adalah kepercayaan, yaitu 50 %. Sedangkan tolong menolong 33,33%, Kekeluargaan 16,66%.

Para pihak pada saat melakukan atau membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak pernah menghadirkan saksi yang bisa menguatkan perjanjian

---

<sup>43</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

tersebut, yang diperlukan apabila salah satu pihak wanprestasi.

Tabel 10<sup>44</sup>

Kehadiran Saksi

N=30

Dihadiri saksi	Jumlah	Prosentase
Ya	0	0%
Tidak	30	100%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 10 di atas, kehadiran saksi saat pembuatan perjanjian atau pencapaian kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak dibutuhkan oleh para pihak, yaitu yang tidak menhadirkan saksi sebanyak 100%.

Dari data-data tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) tidak dilaksanakan di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Bila kita tinjau, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi Hasil (tanah pertanian) dibuat oleh para pembuat Undang-Undang tersebut dengan maksud baik, diantaranya yang

---

<sup>44</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

tertera dalam penjelasan umumnya yang berusaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud :

- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil
- b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin jadi penggarapnya adalah sangat besar
- c. menambah kegembiraan bekerja para petani penggarap, yang akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan , yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi kebutuhan hidup rakyat.



Hal lain yang bersifat melindungi para pihak yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tersebut seperti dalam penjelasan umum yang lainnya yang menyatakan bahwa mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat / sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain daripada itu perjanjian tersebut menurut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun, yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk memperoleh tanah

garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka penjabat-penjabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

Akan tetapi, karena ketidaktahuan masyarakat khususnya para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian akan adanya Undang-Undang tersebut serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan. Pihak pemilik tanah dan pihak penggarap lebih cenderung membuat perjanjian sesuai dengan kebiasaan yang telah lama berlaku dimasyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Undang-Undang tersebut dimasyarakat.

Di Desa Pakopen, hampir setiap satu tahun dua kali diadakan penyuluhan kesadaran hukum dari dinas-dinas terkait seperti Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan

Nasional , Pemerintah Daerah dan lain-lain. Akan tetapi masyarakat yang hadir dalam penyuluhan tersebut tidak termasuk masyarakat umum, hanya para pamong atau pelaksana pemerintahan desa. Setelah penyuluhan tersebut selesai, para pamong yang hadir tidak meneruskan informasi yang mereka terima kepada masyarakat umum. Selain itu, masalah – masalah yang disinggung dalam materi penyuluhan hukum tersebut tidak termasuk di dalamnya mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Jadi pengetahuan masyarakat Desa Pakopen akan perjanjian bagi hasil tanah pertanian terbatas pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama hidup dimasyarakat. Dengan demikian Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) sudah barang tentu tidak dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya pihak penegak hukum dalam mensosialisasikan Undang-Undang tersebut ke masyarakat.

Aspek lain yang mendukung tidak dilaksanakannya Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tersebut adalah fakta hukum yang kurang sesuai dengan penegakan hukum masa sekarang yaitu sanksi yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) terlalu ringan, yaitu dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Perjanjian tertulis yang sangat penting untuk melindungi para pihak apabila salah satu pihak wanprestasi, pihak lain yang dirugikan akan dapat mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan hak-haknya yang ada dalam perjanjian. Karena perjanjian tertulis yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya.

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakopen, para pihak baik pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap sama-sama memilih secara lisan. Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil (tanah pertanian) telah mengatur mengenai bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yaitu pada Pasal 3 yang mengharuskan semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selain itu perjanjian bagi hasil tersebut memerlukan pengesahan dari Camat setempat. Alasan pemilik dan penggarap tidak melakukan perjanjian bagi hasil tanah tersebut secara lisan, karena biaya yang akan dikeluarkan mereka rasakan memberatkan. Meskipun bukan akta Notariil, tetapi biaya administrasi dalam pembuatan perjanjian tertulis tersebut baik di Kantor Desa maupun

pada saat pengesahan di Kecamatan akan terasa memberatkan kedua belah pihak. Pihak penggarap maupun pihak pemilik tidak bersedia mengeluarkan uang selain biaya-biaya penggarapan tanah tersebut.

Alasan lain dilakukannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan oleh para pihak, yaitu prosedur pembuatannya rumit. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan sebagian besar pelaku perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tamat SD. Apabila mereka harus membuat isi perjanjian dan menuangkannya dalam tulisan, mereka akan kesulitan. Selain itu, para pihak baik pihak pemilik maupun pihak penggarap enggan apabila harus berhadapan dengan para birokrat Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Keengganan mereka dikarenakan pengetahuan mereka akan prosedur birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, mereka lebih memilih melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan.

Rasa saling percaya antara pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap merupakan salah satu alasan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dilakukan secara lisan. Karena dengan diadakannya perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis para pihak akan merasa bahwa kepercayaan satu pihak pada pihak

yang lainnya menjadi berkurang. Kepercayaan dalam tulisan ini diartikan sebagai kepercayaan pribadi antara pemilik tanah dan penggarap dengan saling memegang kata-kata yang diucapkan para pihak. Pihak pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada penggarap dengan harapan dan keyakinannya pihak penggarap akan menggarap tanah dan merawat tanaman dengan baik, sehingga hasil yang akan mereka peroleh juga akan baik. Pihak penggarap tanah juga akan berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selain kepercayaan, dasar dari perjanjian bagi hasil secara lisan adalah tolong menolong. Pihak pemilik tanah berusaha menolong pihak lain yang membutuhkan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memberi kesempatan menggarap tanah miliknya. Begitu juga pihak penggarap yang menolong pihak pemilik dengan mengerjakan tanah milik pihak pemilik sehingga menghasilkan tanpa pemilik tanah harus mengerjakannya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek kebudayaan jawa yang lebih mengutamakan kepercayaan, tolong menolong / kerukunan telah mengakar di masyarakat.

Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil (tanah pertanian) mengatur mengenai keharusan hadirnya dua orang saksi , masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap yaitu pada Pasal 3 ayat (1). Di Desa Pakopen, kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil juga tidak dibutuhkan oleh para pihak. Karena selain adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, mereka juga menggunakan dasar dibuatnya perjanjian bagi hasil secara kekeluargaan. Yang mana dengan adanya rasa kekeluargaan tersebut, tidak ada kesewenang-wenangan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Karena dalam kebudayaan Jawa rasa kekeluargaan mengandung makna “ewuh – pekewuh” (sungkan) apabila salah satu pihak akan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain.

Menurut Soewito, selama ini belum pernah ada satupun pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara tertulis di Desa Pakopen. Karena pada dasarnya para pihak melakukan perjanjian bagi hasil itu secara kekeluargaan. Salah satu sifat dari adanya rasa kekeluargaan itu adalah rasa “ewuh-pekewuh” untuk melakukan hal-hal yang saling merugikan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soewito, Sekertaris Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Wawancara Pribadi, Semarang* ,17 Juni 2002

Rasa “ewuh –pekewuh” tersebut sesuai dengan etika Jawa yang telah di jelaskan dalam kerangka berpikir pada bab terdahulu, yang merupakan salah satu cara pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.

#### 4. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah barang tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun hanya sebagian kecil dari para pihak pelaku perjanjian bagi hasil tersebut. Pada saat membuat perjanjian bagi hasil, para pihak seringkali tidak memperhatikan kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang bakal dihadapi.

Permasalahan yang bakal dihadapi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu resiko dan sengketa.

##### a. Resiko

Resiko dalam hal ini adalah resiko yang mungkin terjadi selama perjanjian bagi hasil, seperti gagal panen, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pertanian, serta kurangnya biaya untuk pengerjaan tanah.



Menurut K. Suwandi, di Desa Pakopen, penanggung resiko apabila gagal panen yang disebabkan adanya musim kering yang berkepanjangan, wabah hama maupun penyakit pertanian yang tidak dapat dikendalikan adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemilik dan pihak penggarap. Penanggungan resiko setelah terjadinya gagal panen tersebut dibicarakan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Karena hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak penggarap, tetapi diluar kemampuan dan kemauan pihak penggarap. Sedangkan apabila gagal panen tersebut terjadi akibat kelalaian maupun kecerobohan dari penggarap, sehingga hasil pertanian menjadi "puso" (rusak), maka resiko ditanggung oleh pihak penggarap, setelah diadakannya perundingan antara kedua belah pihak.

Mengenai resiko mahal nya harga pupuk dan obat-obatan pertanian, adalah menjadi tanggungan pihak penggarap. Hal tersebut terjadi karena di Desa Pakopen, dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini seluruh biaya perawatan seperti pupuk, racun hama, dan bibit tanaman ditanggung oleh penggarap secara keseluruhan. Jadi pihak pemilik tanah tinggal menerima bagian dari hasil bersih nya, yaitu hasil panen kotor setelah dikurangi

“derepan” (upah potong tanaman). Jadi pemilik tidak ikut terlibat sama sekali dalam hal perawatan tanaman.

Untuk resiko kurangnya biaya pengerjaan tanah seperti biaya ternak, biaya mencangkul , biaya menanam serta biaya merawat tanaman sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.<sup>46</sup>

Mengenai resiko yang dialami para pihak dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 11<sup>47</sup>  
Resiko Yang Dialami  
N=30

Jenis resiko	Jumlah	Prosentase
Gagal Panen	10	33,33%
Harga pupuk dan obat-obatan pertanian mahal	12	40%
Kurang biaya pengerjaan tanah	8	26,66%
Jumlah	30	100%

---

<sup>46</sup> K.Suwandi, Kepala Desa pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 24 Agustus 2002

<sup>47</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

Dari tabel 11 di atas, dapat diketahui jenis resiko yang paling banyak dialami dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah harga pupuk dan obat-obatan mahal yaitu 40%, sedangkan resiko gagal panen 33,33%, kemudian kurangnya biaya pengerjaan tanah 26,66%.

Tabel 11 tersebut berkaitan dengan tabel penanggung resiko dibawah ini.

Tabel 12<sup>48</sup>  
Penanggung Resiko  
N=30

Penanggung resiko	Jumlah	Prosentase
Penggarap	19	63,33%
Pemilik	0	0%
Kedua pihak	11	36,66%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 12 di atas, terlihat penanggung resiko terbanyak adalah penggarap yaitu 63,33%, sedangkan penanggung resiko kedua belah pihak adalah 36,66%.

---

<sup>48</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

b. Sengketa

Menurut Soewito, sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakopen selama ini diselesaikan oleh kedua belah pihak sendiri. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya penyelesaian sengketa yang sampai masuk ke Kantor Desa. Mereka lebih memilih menyelesaikannya secara interen antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak lain. Penyelesaian tersebut melalui cara musyawarah. Dengan musyawarah yang mengandung makna kekeluargaan diantara para pihak, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hanya saja pihak yang dirugikan biasanya pemilik tanah apabila sengketa berhubungan dengan kecurangan pihak penggarap, maka pemilik tanah tidak akan lagi mempercayakan penggarapan tanah miliknya kepada pihak penggarap yang telah melakukan kecurangan. Jadi kepercayaan dari pihak pemilik telah berkurang atau bahkan hilang sama sekali kepada pihak penggarap tersebut.<sup>49</sup>

Adapun penyebab terjadinya sengketa tersebut adalah:

---

<sup>49</sup> Soewito, Sekertaris Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 17 Juni 2002

1. Pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal ini terjadi karena pihak pemilik tanah mengetahui sendiri kondisi tanaman pada saat sebelum maupun sesudah dipanen yang sebenarnya hasilnya bagus, tetapi oleh pihak penggarap dilaporkan bahwa hasil pertaniannya jelek atau banyak yang rusak. Sehingga bagian dari pemilik tanah menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya diterimanya.

2. Tidak dibaginya hasil pertanian sama sekali

Hal ini terjadi pada tanah yang letaknya sangat jauh dengan tempat tinggal pemilik, sehingga pemilik tidak pernah mengetahui sama sekali kondisi pertanian yang sebenarnya. Tetapi suatu saat pemilik tanah tahu bahwa ternyata tanah yang digarap oleh pihak penggarap menghasilkan, tetapi laporan penggarap mengatakan bahwa kondisi tanaman rusak karena hal-hal diluar kemampuan penggarap. Jadi pemilik sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut.

Terjadinya sengketa dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian antara para pihak dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel 13<sup>50</sup>  
Terjadinya Sengketa  
N=30

Terjadi Sengketa	Jumlah	Prosentase
Ya	2	6,66%
Tidak	28	93,33%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 13 diatas , dapat diketahui bahwa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian sangat kecil kemungkinan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak. Yang pernah mengalami terjadinya sengketa adalah 6,66%, sedangkan yang tidak pernah terjadi sengketa adalah 93,33%.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui jalan musyawarah. Karena mereka masih menganggap bahwa jalan musyawarah adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu pihak yang dirugikan apabila akan mengajukan pihak yang merugikan ke pengadilan masih memikirkan biaya yang akan dikeluarkan lebih besar sehingga tidak sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Adanya rasa kasihan kepada

---

<sup>50</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

pihak yang merugikan apabila harus menjalani keputusan pengadilan, akibat adanya rasa kekeluargaan yang mengikat. Yang paling kuat alasan pihak yang dirugikan tidak ke pengadilan yaitu adanya alasan yang berhubungan dengan religius (agama) , yaitu percaya adanya pembalasan dari Tuhan . Hal tersebut sesuai dengan kebudayaan Jawa yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Tabel 15<sup>51</sup>

Penyelesaian Sengketa

N=30

Penyelesaian Masalah	Jumlah	Prosentase
Musyawarah	30	100%
Lewat Pengadilan	0	0%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 15 di atas yang akan terkait dengan tabel 16 terlihat bahwa jalan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak 100% dipilih oleh informan sesuai dengan kerangka berpikir pada bab terdahulu musyawarah untuk mufakat merupakan akar kebudayaan Jawa.

---

<sup>51</sup> Informan, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Juni 2002

Tabel 16<sup>52</sup>

## Alasan Sengketa Tidak Dituntut ke Pengadilan

N=30

Alasan	Jumlah	Prosentase
Rasa kasihan	4	13.33%
Biaya mahal	7	23.33%
Kekeluargaan	5	6.66%
Percaya adanya pembalasan dari Tuhan	13	43.33%
Jumlah	30	100%

Dari tabel 16 tersebut di atas menyatakan bahwa percaya adanya pembalasan dari Tuhan adalah alasan terbesar sengketa tidak dibawa sampai ke Pengadilan yaitu 43,33%, kemudian alasan biaya mahal 23,33%, kekeluargaan 6,66% sedangkan rasa kasihan 13,33%.

---

<sup>52</sup> Ibid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

##### **A. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakopen Kecamatan bawen Kabupaten Semarang**

- a. Untuk tanaman padi, sistem perimbangan bagi hasilnya adalah maro atau 1:1. maksudnya satu bagian untuk pemilik tanah, satu bagian untuk penggarap.
- b. Untuk tanaman palawija dan sayur-sayuran sistem perimbangannya adalah mertelu atau 1:2. Maksudnya satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk penggarap.

Sedangkan hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil panen setelah dikurangi 'derepan' atau upah potong. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Presiden 13 tahun 1980 tentang pedoman Pelaksanaan Undang-Undang bagi hasil nomor 2 tahun 1960 pada Pasal 4 ayat (2).

B. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) di Desa Pakopen

- a. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh para penegak hukum.
- b. Sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggaran isi Undang-Undang tersebut merupakan fakta hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Mengenai tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis, dikarenakan oleh;

- a. Adanya faktor kepercayaan yang sangat kuat dalam masyarakat
- b. Rumitnya prosedur pembuatan perjanjian tertulis dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan keengganan menghadapi prosedur birokrasi pemerintahan
- c. Mahalnya biaya administrasi yang akan dikeluarkan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian tertulis

C. Penyebab terjadinya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil beserta upaya penyelesaiannya

a. Pembagian hasil pertanian yang tidak sesuai dengan perjanjian

b. Tidak dibaginya sama sekali hasil pertanian

Upaya penyelesaian sengketa dengan musyawarah untuk mufakat.

## 2. SARAN

- Kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah, hendaknya lebih mensosialisasikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil (tanah pertanian) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat khususnya pelaksana perjanjian bagi hasil tanah pertanian, agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi

- Kepada masyarakat yang telah mengetahui adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tersebut hendaknya dalam mengadakan perjanjian bagi hasil

tanah pertanian berdasarkan aturan-aturan yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut, agar tidak ada pihak yang lebih diuntungkan sehingga merugikan pihak lainnya.

## **RINGKASAN**

Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) telah lama diundangkan. Akan tetapi di Desa Pakopen kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, keberadaan Undang-Undang yang sebenarnya isinya melindungi para pihak yang membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, baik pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap tetapi tidak dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa aspek yang mempengaruhinya. Diantaranya ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan Undang-Undang tersebut yang disebabkan kurangnya sosialisasi. Selain itu, apabila ditinjau lebih jauh, dalam Pasal 15 mengatur sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggaran terhadap isi Undang-Undang tersebut, yaitu denda sebesar Rp.10.000,-. sehingga menyebabkan pihak yang mungkin mengetahuinya memilih untuk tidak melaksanakannya. Sebagai salah satu contohnya adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar pembuatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis yang diatur di dalam Pasal 3. Selain aspek tersebut, di dalam masyarakat faktor kepercayaan sangat kuat dalam pembuatan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan. Meskipun demikian, terjadinya

sengketa diantara para pihak jarang terjadi. Apabila terjadi sengketa, mereka memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Sehingga permasalahan tersebut tidak sampai dibawa ke pihak lain, ataupun ke Kepala Desa setempat.

Namun demikian, jauh akan lebih baik apabila Undang-Undang Bagi Hasil ini disosialisasikan ke masyarakat, sehingga menambah pengetahuan masyarakat akan manfaat dari Undang-Undang tersebut yang melindungi para pihak, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blau, M.Peter dalam Padgarechi, Adam Whelan Christoper J, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Terjemahan Oleh Rnc.Widyaningsih dan G.kartasaputra; Bina Aksara
- Bzn, Ter Haar, 1970, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng.Suebeki Poesponoto, Pradnya Paramita; Jakarta.
- Darmaputera, Eka, 1997, *Pancasila ; Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis Budaya*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia
- Djojodigono, MM, Tanpa Tahun , *Menyandera Hukum Adat*, Borobudur; Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Malang; Yayasan Asah, Asih, Asuh.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis : Citra Aditya Bakti*
- Hadikusumo, Hilman, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, PT ; Bandung.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segu-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung; Alumni.
- M,A Qhom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian*, Yogyakarta; Liberty.
- Magnis Suseno, Franz, 1993, *Etika Jawa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, *Hukum Perutangan.*

Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM

Moehadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta;

Raka Sarasih

Moleong, Lexy J, 1983, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :

Remaja Rosda Karya

Muhammad ,Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan* , Bandung; Citra

Aditya bakti.

Mulder, Niels, 1996, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional,*

Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM.

-----, 1996, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional,*

Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM

Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung;

Tarsito.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan*

*yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang),*

Bandung; Mandar Maju.

Patrik, Purwahid, 1986, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam*

*Perjanjian*, Semarang; Badan Penerbit UNDIP.

Prodjodikoro, Wirjono, 1976, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung;

Sumur.

Prodjodikoro, Wirjono, tanpa tahun, *Asas-Asas Hukum Perjanjian,*

Bandung;Bale.



- Satrio, J, 1989, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Purwokerto;Hensa
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung ; Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Hukum*, Bandung ; Sinar Baru.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1970, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam hukum Adat*, Jakarta; pradnya Paramita.
- Soetrisno, PH, 1997, *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta : Pandawa
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta;PT Raja Grafindo Persada
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta;Intermasa.
- Sudiyat, iman, 1981, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta; Liberty.
- Sunaryo, 1998, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Adat II*, Solo : UNS Press
- Suria Sumantri, Jujun,1993, *Ilmu Dalam Perspektif*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Malaysia.
- Sutopo,HB, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*; Pusat Penelitian UNS.

Wignyo R. ,Soerojo, 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*,  
Bandung; Penerbit Alumni.

\_\_\_\_\_, *Buku Profil Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten  
Semarang*, tahun 2001/2002.

### **Undang-Undang**

Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil